



Peningkatan Efektivitas Administrasi Publik melalui Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah di Bapperida Kabupaten Bangkalan

Improving the Effectiveness of Public Administration through Assistance in the Preparation of Regional Development Planning Documents at Bapperida Bangkalan Regency

Sistifanie Putri Handayani^{1*}, Auliya Zulfatillah²

¹⁻²Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

*Korespondensi penulis: auliya.zulfatillah@trunojoyo.ac.id

Article History:

Received: Mei 30, 2025;

Revised: Juni 15, 2025;

Accepted: Juli 01, 2025;

Published: Juli 04, 2025

Keywords: Development Planning, Local Government, Public Administration.

Abstract: The mentoring activity for preparing regional development planning documents at Bapperida Bangkalan Regency is part of a community service program aimed at improving the effectiveness of public administration. During the program, students were directly involved in collecting and processing data, analyzing program performance indicators, and assisting in drafting and evaluating planning documents such as the RKPD, RPJMD, and RPD. This activity also supported the budgeting process, program consistency assessment, and public service performance measurement through the Community Satisfaction Survey (SKM). The results of the mentoring program show that collaboration between academia and local government can improve work efficiency, the quality of planning documents, and the capacity of civil servants in developing data-driven policies. This activity not only benefited the institution but also served as a real-world learning experience for students in understanding public administration practices at the regional level.

Abstrak

Kegiatan pendampingan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah di Bapperida Kabupaten Bangkalan merupakan bagian dari program pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas administrasi publik. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa terlibat langsung dalam proses pengumpulan dan pengolahan data, analisis indikator kinerja program, serta penyusunan dan evaluasi dokumen perencanaan seperti RKPD, RPJMD, dan RPD. Kegiatan ini juga memberikan dukungan terhadap proses penghitungan pagu anggaran, konsistensi program, serta pengukuran kinerja pelayanan publik melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Hasil dari kegiatan pendampingan ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara unsur akademik dan pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi kerja, kualitas dokumen perencanaan, serta kapasitas aparatur dalam menyusun kebijakan berbasis data dan kebutuhan nyata. Pendampingan ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi instansi, tetapi juga menjadi media pembelajaran langsung bagi mahasiswa dalam memahami praktik administrasi pemerintahan di tingkat daerah.

Kata Kunci: Administrasi Publik, Pemerintahan Daerah, Perencanaan Pembangunan.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam menciptakan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Proses perencanaan pembangunan dan penyusunan dokumen perencanaan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta Rencana Pembangunan Daerah (RPD), dokumen tersebut menjadi pedoman strategis bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan, prioritas program, serta pengalokasian anggaran secara efektif dan memerlukan suatu sistem administrasi publik yang efektif dan efisien (Ilmiah et al., 2024). Administrasi publik yang baik akan memastikan bahwa semua tahapan perencanaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan, serta memberikan dampak yang positif bagi masyarakat (Siregar et al., 2023).

Perencanaan adalah proses mengidentifikasi tujuan organisasi, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan tersebut, dan mengembangkan rencana kegiatan kerja organisasi. Perencanaan pada dasarnya adalah cara untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah dan efektif sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Dalam perencanaan, meliputi perumusan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Semua kegiatan manajemen tidak akan lepas dari perencanaan. Keberhasilan kegiatan organisasi ditentukan oleh cara penyusunan rencana. Penganggaran merupakan komponen utama dalam menjalankan setiap program dan kegiatan, penganggaran mencantumkan beberapa fungsi penting termasuk sebuah ketentuan kerangka kerja untuk menilai akuntabilitas kinerja (Putri Ayudia, 2023).

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses yang kompleks dan menyeluruh yang melibatkan berbagai tahapan strategis dalam menentukan arah, kebijakan, dan prioritas pembangunan di tingkat lokal (Muzaqi & Ambulanto, 2020). Proses ini menghasilkan dokumen- dokumen penting seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta Rencana Pembangunan Daerah (RPD), yang menjadi pedoman dalam pengalokasian anggaran dan pelaksanaan program daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Bangkalan merupakan institusi yang bertanggung jawab dalam menyusun dokumen-dokumen perencanaan. Menurut (Rahmania et al., n.d.) dalam prosesnya, Bapperida tidak hanya berperan sebagai perumus, tetapi juga sebagai fasilitator yang menjembatani antara aspirasi masyarakat, kebutuhan perangkat daerah, dan kebijakan pemerintah pusat. Bapperida juga melaksanakan kegiatan evaluasi dan pengendalian pembangunan, serta mengoordinasikan pelaksanaan forum- forum partisipatif seperti forum konsultasi publik dan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang). Proses ini sangat kompleks, menuntut ketelitian dalam pengolahan data, akurasi dalam penyusunan dokumen, dan kemampuan untuk mengakomodasi berbagai masukan dari stakeholder.

Pelaksanaan administrasi publik di tingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam hal efektivitas administrasi publik. Permasalahan yang kerap muncul antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kurang optimalnya pengolahan data pembangunan, serta kurangnya partisipasi dalam pelaksanaan evaluasi program dan forum-forum perencanaan partisipatif. Hal ini berdampak pada kurang maksimalnya kualitas dokumen perencanaan serta pengambilan kebijakan yang tidak sepenuhnya berbasis data dan kebutuhan nyata di lapangan (Sudianing, 2020).

Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah diperlukan upaya kolaboratif yang melibatkan berbagai elemen, termasuk kalangan akademisi. Dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi, memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi nyata melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu bentuk kontribusi tersebut adalah pendampingan kepada instansi pemerintah dalam hal perbaikan tata kelola administrasi publik dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah. Melalui kegiatan pendampingan ini, tim dari perguruan tinggi dapat berperan aktif dalam mendukung pengumpulan dan pengolahan data, memberikan pelatihan teknis penyusunan dokumen perencanaan, serta membantu proses evaluasi dan pelaporan program pembangunan. Selain itu, kolaborasi ini juga berperan dalam mendorong peningkatan kapasitas aparatur sipil negara, khususnya dalam bidang perencanaan dan evaluasi pembangunan. Hal ini diharapkan dapat mendorong lahirnya dokumen perencanaan yang lebih akurat, transparan, dan partisipatif.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses penting yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menentukan arah, kebijakan, dan prioritas pembangunan dalam jangka waktu tertentu (Sudianing, 2020). Tujuan dari perencanaan ini adalah untuk menciptakan pembangunan yang terarah, berkelanjutan, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi daerah setempat (Yorisca, 2020). Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan tidak hanya menjadi pedoman bagi pemerintah, tetapi juga menjadi alat untuk mengukur sejauh mana program dan kegiatan pembangunan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan hasil dari proses perencanaan tersebut. Dokumen ini disusun secara sistematis dan berdasarkan peraturan yang berlaku (Dianto, 2021). Salah satu dasar hukum utama penyusunan dokumen perencanaan adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

yang menyatakan bahwa pembangunan nasional, termasuk pembangunan daerah, harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara menyeluruh dan terpadu. Selain itu, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 juga menjadi acuan penting dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah, mulai dari tahap awal perencanaan hingga pelaporan dan evaluasi (Saifuddin, 2022).

Terdapat beberapa jenis dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memiliki fungsi dan jangka waktu yang berbeda-beda. Dokumen yang bersifat jangka menengah adalah RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Dokumen ini disusun setiap lima tahun sekali dan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta arah kebijakan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh kepala daerah selama masa jabatannya. RPJMD menjadi acuan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya (Kertati et al., 2022). Sedangkan untuk dokumen perencanaan tahunan, pemerintah daerah menyusun RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan berfungsi sebagai dasar dalam penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) setiap tahunnya (Romadona et al., n.d.). Dokumen ini memuat prioritas pembangunan, target, rencana kerja, dan rencana pembiayaan. Selain RPJMD dan RKPD, terdapat pula dokumen RPD (Rencana Pembangunan Daerah) yang digunakan ketika daerah berada dalam masa transisi kepemimpinan, serta dokumen turunan lainnya seperti Renstra (Rencana Strategis Perangkat Daerah) dan Renja (Rencana Kerja Perangkat Daerah) (I Gde Made Metera, 2024).

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dilakukan secara partisipatif, yang artinya melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, instansi teknis, hingga masyarakat melalui forum-forum seperti Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Partisipasi masyarakat sangat penting karena membantu pemerintah mendapatkan masukan langsung dari warga mengenai kebutuhan dan permasalahan di lapangan. Dengan demikian, dokumen yang dihasilkan benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat (Wulan, 2021).

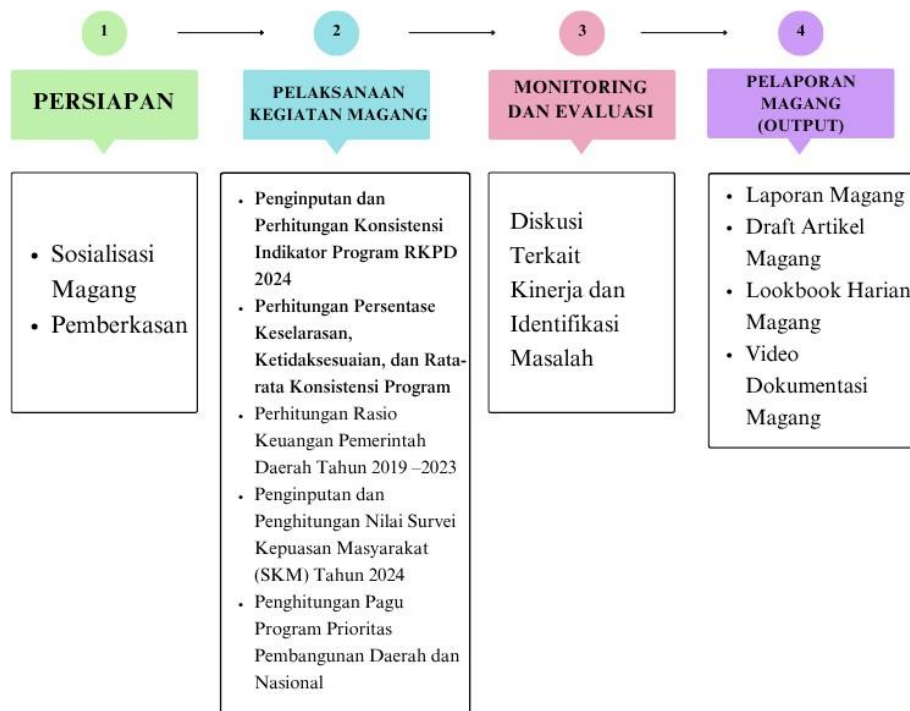
Secara umum, dokumen perencanaan pembangunan daerah memiliki peran penting sebagai panduan dalam pelaksanaan pembangunan. Dokumen ini tidak hanya menjadi dasar hukum dan administrasi, tetapi juga menjadi alat pengendali dan evaluasi agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai rencana (Sacipto et al., 2023). Selain itu, dokumen perencanaan juga berfungsi untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga tidak ada program yang keluar dari arah kebijakan yang telah ditetapkan (Ni Ketut Sudianing, 2020). Dengan adanya dokumen perencanaan pembangunan yang baik, pemerintah

daerah dapat merancang program dan kegiatan yang tepat sasaran, efisien, dan berorientasi pada hasil. Hal ini penting untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang baik (good governance), transparan, dan akuntabel, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan (Guntoro, 2021).

2. METODE

Kegiatan pendampingan dilaksanakan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Bangkalan yang bertempat di Jl. Soekarno Hatta No.35, Mlajah, Kec. Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, pada bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi (Rendalev). Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan selama 4 bulan, yaitu mulai tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 Juni 2025. Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang terstruktur.

Tahap pertama adalah tahap persiapan, yang mencakup kegiatan sosialisasi serta pemberkasan. Selanjutnya, pelaksanaan pendampingan di instansi atau lembaga terkait. Selama masa pendampingan berlangsung, dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi untuk menilai proses dan capaian yang telah diraih. Tahap akhir dari kegiatan ini adalah pelaporan hasil pendampingan, yang terdiri atas penyusunan laporan pendampingan, draft artikel pendampingan, serta video dokumentasi sebagai bentuk output dari kegiatan pendampingan.



Sumber: Penulis (2025)

Gambar 1. Tahapan Kegiatan Pendampingan Industri

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan yang dilakukan di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Bangkalan memberikan kontribusi nyata dalam mendukung proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Selama masa pelaksanaan, keterlibatan difokuskan pada berbagai tugas teknis yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, hingga analisis data numerik yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen RKPD, RPD, dan RPJMD.

1) Penginputan dan Perhitungan Konsistensi Indikator Program RKPD Tahun 2024

Dilakukan proses penginputan data indikator program (outcome) beserta target capaian tahun 2024 ke dalam sistem kerja Bapperida. Setelah penginputan, dilakukan perhitungan untuk mengukur konsistensi antara indikator program, target yang direncanakan, realisasi capaian, serta anggaran (pagu) yang dialokasikan. Perhitungan ini memberikan gambaran sejauh mana program yang telah dijalankan selaras dengan rencana awal dan seefektif apa alokasi anggarannya digunakan.

RKPD 2024									
No.	Perangkat Daerah	Program	RKPD 2024				Penganggaran 2024		
			Indikator Program (outcome)	Target	Pagu	Program	Indikator Program (outcome)	Target	Pagu
24	Dinas Perencanaan, Kebijakan dan Komunikasi	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PERENCANAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PROGRAM PENGELOLAAN DAN PERENCANAAN SISTEM AIR LAMBAH PROGRAM PELATIHAN BANGKUAN GIZO PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN PROGRAM PELAKSANAAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMBUH PROGRAM PESTISIDAN UPAKAIAN PEMERINTAHAN EMERGENSI KADISTEK/ROTA	Persentase Desa yang terlayani Sistem Penyediaan Air minum (SPAM) Persentase Pemukiman kumuh (tanpa pemukiman kumuh) sesuai target SPK Persentase bangkuan gedung pemerintah yang dibangun (dibangun/di rencanakan) SLP Persentase kawasan permukiman yang terlayani dengan baik Persentase Pemukiman kumuh persentase pemukiman kumuh yang terlayani dengan baik Indeks kagiatan layanan pemungutan sampah pemertanian danrural	82 % 32% 20% 84,20% 84,20% 6.626.203,618	12.446.802.000 16.916.218.500 270.000.000 18.501.899.992 199.370.018 6.626.203,618	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PERENCANAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PROGRAM PENGELOLAAN DAN PERENCANAAN SISTEM AIR LAMBAH PROGRAM PELATIHAN BANGKUAN GIZO PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN PROGRAM PELAKSANAAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMBUH PROGRAM PESTISIDAN UPAKAIAN PEMERINTAHAN EMERGENSI KADISTEK/ROTA	Persentase Desa yang terlayani Sistem Penyediaan Air minum (SPAM) Persentase Pemukiman kumuh (tanpa pemukiman kumuh) sesuai target SPK Persentase bangkuan gedung pemerintah yang dibangun (dibangun/di rencanakan) SLP Persentase kawasan permukiman yang terlayani dengan baik Persentase Pemukiman kumuh persentase pemukiman kumuh yang terlayani dengan baik Indeks kagiatan layanan pemungutan sampah pemertanian danrural	82 % 32% 20% 84,20% 84,20% 6.623.209,969	12.446.802.000 16.916.218.500 220.000.000 18.501.899.992 199.370.018 6.623.209,969
25	Sekolah Pesisir Pematang Jaya	PROGRAM PENINGKATAN KETERAMPILAN URAKIN TERPADU	Persentase Perilaku dan Dalam Pelanggaran Transisi	100%	1.997.414.900	PROGRAM PENINGKATAN KETERAMPILAN URAKIN TERPADU	Persentase Perilaku dan Dalam Pelanggaran Transisi	100%	1.997.414.900

Sumber: Bapperida Kabupaten Bangkalan (2025)

Gambar 2. Penginputan dan Perhitungan Konsistensi Indikator Program RKPD Tahun 2024

2) Perhitungan Persentase Keselarasan, Ketidaksesuaian, dan Rata-rata Konsistensi

Program. Data indikator yang telah dimasukkan selanjutnya diolah untuk menghitung persentase Keselarasan antara perencanaan dan realisasi, termasuk identifikasi apakah ada ketidaksesuaian. Perhitungan rata-rata dari kesesuaian indikator program juga dilakukan untuk memberikan gambaran angka tentang tingkat konsistensi keseluruhan program. Hasil dari kegiatan ini digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar pertimbangan dalam menyusun perencanaan pembangunan di tahun berikutnya.

The screenshot shows a Google Sheet titled "Realisasi Program 2024.xlsx". The sheet contains a table with columns for indicators, targets, and actuals for various programs in 2024. The table is organized into sections for different programs, with rows detailing specific indicators and their corresponding values. The interface includes a menu bar at the top with options like File, Edit, and View, and a search bar at the bottom.

Sumber: Bapperida Kabupaten Bangkalan (2025)

Gambar 3. Perhitungan Persentase Keselarasan, Ketidaksesuaian, dan Rata-rata Konsistensi Program

3) Perhitungan Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019–2023. Dilakukan analisis terhadap rasio keuangan daerah yang meliputi rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas untuk periode lima tahun terakhir. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, rasio solvabilitas untuk mengetahui kapasitas jangka panjang dalam memenuhi utang, dan rasio aktivitas untuk menilai efisiensi penggunaan aset dalam mendukung program pembangunan. Hasil analisis ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi keuangan daerah yang digunakan sebagai landasan perencanaan keuangan jangka menengah.

No	Uraian	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023* (Rp)
A Rasio Likuiditas						
	Aset Lancar	240.092.396.256,92	235.535.737.266,63	224.681.449.107,05	265.889.863.915,03	202.015.911.359,70
	Persediaan	43.915.931.136,00	46.444.734.500,00	26.083.640.687,00	21.796.591.875,00	22.048.322.035,00
	Kewajiban Jangka Pendek	66.473.922.920,10	47.096.830.701,10	46.388.097.154,19	65.782.714.900,88	25.722.578.578,47
1	Rasio Lancar	3,61	5,00	4,84	4,04	7,85
2	Rasio Quick	2,95	4,01	4,28	3,71	7,00
B Rasio Solvabilitas						
	Total Aset	3.244.033.835.502,95	3.219.383.015.298,06	3.248.748.668.429,28	3.287.355.807.994,24	3.415.511.241.599,95
	Total Hutang	66.473.922.920,10	47.096.830.701,10	46.388.097.154,19	65.782.714.900,88	25.722.578.578,47
	Total Ekuitas	3.177.559.912.582,85	3.172.286.184.596,96	3.202.360.571.275,09	3.221.573.093.093,46	3.389.788.663.021,48
1	DAR (Debt to Assets Ratio)	0,0205	0,0146	0,0143	0,0200	0,0075
2	DER (Debt to Equity Ratio)	0,0209	0,0148	0,0145	0,0204	0,0076
C Rasio Aktivitas						
	Pendapatan Daerah	2.034.156.539.451,02	2.331.628.800.501,49	2.140.808.956.309,69	2.275.095.391.762,23	2.220.215.269.051,80
	Saldo Awal Piutang	21.229.409.463,07	59.308.963.374,43	80.210.749.460,96	69.379.134.385,36	51.023.373.778,03
	Saldo Akhir Piutang	59.308.963.374,43	80.210.749.460,96	69.379.134.385,36	51.023.373.778,03	51.023.373.778,03
1	Rata-rata Umur Piutang	7,2	10,9	12,8	9,7	8,4
	Nilai Persediaan (Beban Persediaan)	173.578.035.780,12	180.416.035.997,56	205.830.408.920,69	188.493.184.769,14	188.493.184.769,14
	Saldo Awal Persediaan	47.536.905.786,00	43.915.931.136,00	46.444.734.500,00	26.083.640.687,00	21.796.591.875,00
	Saldo Akhir Persediaan	43.915.931.136,00	46.444.734.500,00	26.083.640.687,00	21.796.591.875,00	21.796.591.875,00
2	Rata-rata Umur Persediaan	96,15	91,40	64,31	46,36	42,21

Sumber: Bapperida Kabupaten Bangkalan (2025)

Gambar 4. Perhitungan Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019–2023

- 4) Penginputan dan Penghitungan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2024. Data hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dikumpulkan, diinput, dan dihitung rata-rata nilainya. Selanjutnya dilakukan pengklasifikasian predikat layanan berdasarkan skala nilai yang ditentukan (seperti predikat cukup, baik, sangat baik). Hasil pengolahan data SKM ini berfungsi sebagai tolak ukur untuk menilai mutu layanan publik dan menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi peningkatan kualitas pelayanan.

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	2024	PREDIKAT LAYANAN
1	Kec. Bangkalan	82.04	A (S.Baik)
2	Kec. Socah	95.75	A (S.Baik)
3	Kec. Burneh	90.31	B (Baik)
4	Kec. Kamal	76.5	B (Baik)
5	Kec. Aradanya	90.24	A (S.Baik)
6	Kec. Geger	87.13	B (Baik)
7	Kec. Klampis	80.67	B (Baik)
8	Kec. Sepidu	88.79	A (S.Baik)
9	Kec. Tanjung Bumi	84.48	B (Baik)
10	Kec. Kokop	88.79	A (S.Baik)
11	Kec. Kramat	85	B (Baik)
12	Kec. Lubera	83.48	B (Baik)
13	Kec. Tanah Merah	84.89	B (Baik)
14	Kec. Trusmi	89.53	A (S.Baik)
15	Kec. Waka	82.06	B (Baik)
16	Kec. Modung	88.38	A (S.Baik)
17	Kec. Konang	92.82	A (S.Baik)
18	Kec. Gali	79.72	B (Baik)
19	Jumlah	1556.53	
20	Rata-rata SKM Kecamatan	86.36	

Sumber: Bapperida Kabupaten Bangkalan (2025)

Gambar 5. Penginputan dan Penghitungan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2024

- 5) Penghitungan Pagu Program Prioritas Pembangunan Daerah dan Nasional. Dilakukan penghitungan pagu anggaran dari program-program prioritas baik yang berasal dari pemerintah daerah maupun pusat. Proses ini melibatkan rekapitulasi nilai anggaran dari masing-masing kegiatan yang telah direncanakan. Hasil perhitungan ini penting dalam menentukan anggaran serta pengelompokan program berdasarkan urutan prioritas dalam dokumen perencanaan RKPD dan RPJMD.

Kegiatan pendampingan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan selama masa kegiatan pendampingan telah memberikan kontribusi positif, baik bagi instansi mitra maupun bagi pihak yang terlibat secara langsung, termasuk mahasiswa. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga membangun kesadaran akan pentingnya perencanaan pembangunan yang berbasis data, partisipatif, dan terarah.

Melalui keterlibatan dalam proses penyusunan dokumen seperti RKPD, RPJMD, dan RPD, peserta pendampingan turut serta dalam membantu memperkuat tata kelola perencanaan di lingkungan pemerintah daerah. Kegiatan ini mendorong terwujudnya kerja sama antara unsur akademik dan birokrasi daerah, yang pada akhirnya mempercepat proses penyusunan dokumen secara lebih tepat waktu, terstruktur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara keseluruhan, kegiatan pendampingan ini menunjukkan bahwa sinergi antara dunia pendidikan dan pemerintahan daerah sangat penting dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas perencanaan pembangunan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah pembelajaran nyata bagi mahasiswa dalam memahami dinamika, tantangan, serta peluang dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah.

Bapperida Kabupaten Bangkalan diharapkan dapat terus membuka peluang kerja sama dengan pihak kampus, khususnya dalam bentuk pendampingan atau pendampingan mahasiswa. Kegiatan seperti ini sangat bermanfaat karena bisa saling mendukung mahasiswa

mendapatkan pengalaman nyata di lapangan, dan instansi terbantu dalam proses penyusunan dokumen perencanaan. Agar hasilnya lebih maksimal, akan lebih baik jika instansi juga menyediakan arahan kerja yang jelas dan terstruktur, sehingga mahasiswa dapat berkontribusi dengan lebih optimal sesuai kebutuhan instansi.

DAFTAR REFERENSI

- Baca Masyarakat Dusun Ngrancah. (2021). *Jurnal Pustaka Budaya*, 9(2), 93–98.
- Guntoro, M. (2021). Desentralisasi dan otonomi daerah. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 5(2). <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i2.1954>
- Ilmiah, J., Pemerintahan, A., Perundangan, P. P., & Peraturan, A. (2024). Analisis administrasi tahapan kebijakan guna menunjang pelayanan pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pemerintahan dan Perundangan*, 16(2), 176–186.
- Kertati, I., Pratomo, S., & Widyastomo, R. P. (2022). Pendampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan. *Jurnal Suara Pengabdian*, 45(2). <https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/sabda>
- Metera, I. G. M. (2024). Rencana pembangunan, kinerja, dan analisis atas kinerja pemerintah Kabupaten Buleleng tahun 2023. *Jurnal Ilmiah Pemerintahan dan Perundangan*, 16(2).
- Muzaqi, A. H., & Ambulanto, T. (2020). Pemetaan isu strategis dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang. *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara*, 4(2), 172–192. <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v4i2.1201>
- Putri Ayudia, S. A. (2023). Analisis keselarasan dokumen perencanaan, penganggaran, dan akuntabilitas kinerja satuan kerja perangkat daerah (Studi kasus pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh). *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 23(1), 35–44. <https://doi.org/10.30596/14353>
- Rahmania, N., Andika, M., & Febrianti, I. (n.d.). Optimalisasi kegiatan Musrenbang dalam meningkatkan perencanaan partisipatif di Bappeda Kota Mataram.
- Romadona, R. A., Afandi, M. N., & Administrasi, S. N. (n.d.). Analisis sistematika dan konten Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) perubahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Sukabumi. *SeTIA Mengabdi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(1).
- Sacipto, R., Herdhiyani, A., & Permatasari, C. (2023). Harmonisasi peran penegak hukum: Mengawal pemerintah daerah guna keberlanjutan pembangunan. *Jurnal Riset dan Inovasi Nasional*, 7(2). <http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penega>
- Saifuddin, R. (2022). Kualitas perencanaan pembangunan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbang*, 10(3), 309. <https://doi.org/10.35450/jip.v10i03.326>

- Siregar, D. O., Simanjorang, E. F. S., & Prayoga, Y. (2023). Penyelenggaraan administrasi dalam mendukung good governance. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(4), 398–405. <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v3i4.307>
- Sudianing, N. K. (2020). Fungsi perencanaan pembangunan partisipatif dalam peningkatan kinerja kebijakan publik di bidang pembangunan daerah. *Locus*, 12(1), 120–131. <https://doi.org/10.37637/locus.v12i1.292>
- Wulan, P. (2021). Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan.
- Yorisca, Y. (2020). Pembangunan hukum yang berkelanjutan: Usaha mencapai pembangunan nasional yang berkelanjutan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 98. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i1.507>